

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Gambaran umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabata Strutural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, adalah merupakan salah satu unit kerja yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Konsep pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya serta mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia setempat sebaik mungkin. Tindakan yang seharusnya diambil kemudian adalah menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Berdasarkan hal di atas, masih dihadapi berbagai permasalahan dalam memaknai konsep “*community empowerment* (pemberdayaan masyarakat)”. Sebagian besar masyarakat lokal dan pelaku pemberdayaan masyarakat masih terjebak dalam konsep lama yaitu “*community development* (pembangunan masyarakat)”. Pada kenyataannya, sebagian masyarakat lokal masih lebih suka “menikmati” posisinya sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan, sebagian pelaku pemberdayaan masyarakat juga masih lebih menyukai mekanisme “*community development*” yang lebih praktis dilakukan dibanding dengan “*community empowerment*” yang membutuhkan upaya ekstra untuk melakukan pendampingan demi hasil yang efektif dan efisien.

Terlepas dari hal itu meskipun sebagian praktek yang dilakukan masih menganut konsep "pembangunan", tetapi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berupaya untuk menjaga keseimbangan antara konsep *development* dan *empowerment* dalam hal pemberdayaan masyarakat dan desa.

Disisi Pengendalian Pendudu dan Keluarga Berencana terjadi pergeseran paradigma yang cukup signifikan dalam pelaksanaan program KB sejak ditandatanganinya International Conference on Population and Development (ICPD) di Cairo tahun 1994, yaitu dari pendekatan demografis menjadi mengedepankan aspek hak-hak asasi manusia. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera bertolak pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pelaksana daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dibawah tanggung jawab Bupati Kabupaten Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan (Eselon II) sebagai mana tercantum dalam Perda No 49 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Fungsi Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri Dari

1. Kepala.
2. Sekretaria terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan Masyarakat
 - b. Seksi Partisipasi Masyarakat
 - c. Seksi Kelembagaan Adat dan Sosial Budaya
4. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri dari:
 - a. Seksi Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tepat Guna
 - b. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat
 - c. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan
5. Bidang Pemerintahan Nagari terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan Nagari
 - b. Seksi Manajemen Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari
 - c. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari
6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan
 - b. Seksi Keluarga Berencana
 - c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1.3. KEPEGAWAIAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 memiliki kepegawaian administrasi perkantoran sebanyak 42 orang dan penyuluh lapangan sebanyak 56 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar pada masing masing bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rencana Strategis pembangunan Pemberdayaan masyarakat dan Desa (Nagari), Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021 dengan berpedoman kepada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2021.

2.1.1 VISI DAN MISI

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stakeholders*). Visi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tergambar dalam suatu bentuk. untuk mencapai masa depan dengan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dan mengacu pada misi Bupati Pesisir Selatan yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera"

Visi tersebut di atas memberikan pengertian mengenai kondisi masyarakat di masa depan yang mampu mengembangkan potensi diri untuk mencapai kemandirian dengan mengedepankan prinsip demokrasi, partisipasi dan saling percaya dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi dasar.

Misi dari BPM, KB dan PPr yang berpedoman pada RPJM sebagai berikut :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat" misi 1 RPJMD
2. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang" Misi 5 RPJMD

2.1.2. Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi epala daerah, telah ditetapkan tujuan, indikator tujuan dan sasaran OPD badan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang visi dan misi Bupati Pesisir Selatan seperti tabel 2.1.

Tabel 2.1. Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, sasaran dan indikator Sasaran

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Melaksanakan repormasi birokrasi denbgan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Terwujudnya Pengaturan Angka Kelahiran	Persentase Angka Kelahiran	Meningkatkannya Kesertaan PUS yang menggunakan Kontrasepsi	Perasentase PUS yang Ber KB
				Jumlah Pelayanan KB berdasarkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Terlayannya Aseptor MKJP (MOW, MOP, IUD dan Implant serta Aseptor KB Lainnya Melalui Safari KB
				Cakupan kegiatan yang melakukanm/dilakukan pembinaan Kelembagaan KB	Terbinanya lembaga institusi KB dan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Pembinaan dan Penyulahn KB pada Remaja
				Jumlah Lembaga dan Institusi KB yang diberdayakan	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian IMP-KB
					Terlaksananya Kegiatan Harganas TK Propinsi Sumbar
					Tersedianya Operasional penyuluh kb dan Balai penyuluh (DAK Non Fisik) KB
					Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB
2	Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan,	Terwujudnya Daya Saing Nagari	Persentase Nagari sesuai Indek Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Murni Masyarakat	Persentase Jumlah Swadaya Masyarakat
				Persentase Produk Unggulan Di Nagari	Persentase Produk Unggulan di Nagari

	kejahatan dan peredaran obat obatan terlarang				Persentase Jumlah Lembaga Ekonomi Nagari
--	---	--	--	--	--

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan keluarga berencana 2017 adalah sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	Satuan
			2016	
(1)	(3)	(5)	(6)	
1	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	Persentase Jumlah Swadaya Masyarakat	4,60	%
2	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Nagari	Persentase Produk Unggulan di Nagari	0,55	%
		Persentase Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat Nagari	0,51	%
3	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Nagari	Persentase Layanan Pemerintah	70	%
4	Meningkatnya kepesertaan PUS yang menggunakan Kontrasepsi	Persentase PUS yang BerKB	3,10	%
5	Meningkatnya Pembangunan Keluarga Yang berkualitas	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembangunan keluarga dan pembinaan kelompok KB	120	Kelompok

No Program

1	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat Nagari	1.291.039.202
2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari	175.642.499
3	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	163.954.226
4	Program Pengembangan Lembaga Pemerintahan Nagari dan Wali Nagari	259.080.924
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK KB)	1.829.108.078
6	Program Penguatan Kelembagaan	150.483.974
7	Program Pembinaan Intitusi Peduli KKBPK	150.932.000
8	Program Pelayanan Keluarga Berencana	481.611.300

2.3. Indikator kinerja utama

2.3.1. Indikator utama yang masuk dalam RPJM Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan yang mendukung misi dan visi kepala daerah adalah:

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2017
Misi 1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Aparatur yang bersih dan Responsif dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		
Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	0,93
Misi 5. Meningkatkan Peran Struktur Sosial Dalam Rangka Mengurangi Tindak Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat Obatan terlarang		
Persentase PKK Yang Aktif	Persentase	65
Rata rata jumlah binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang aktif membina kelompok	Kelompok	121

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Pengukuran Capaian kinerja mencakup penetapan indikator yang dipergunakan dalam menilai pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2016 – 2021 yang merupakan tahun ke II pelaksanaan dari Renstra. Pada tahun ke Kedua pelaksanaan renstra di laksanakan lima sasaran diantaranya:

1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat:

Indikator Sasaran	Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Persentase Jumlah Swadaya Masyarakat	4,60%	6,22 %	135

2. M
e
n
i
n

gkatkan Pengelolaan Sumberdaya Nagari

Indikator Sasaran	Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Persentase Produk Unggulan Nagari	25,55 %	28,57 %	112 %
b. Persentase Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat Nagari	50,19 %	67,32%	134%

3. M
e
n
i
n
g
k

atnya Pelayanan Pemerintahan Nagari

Indikator Sasaran	Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
a. Persentase Layanan Pemerintah	70%	76,90	108,32

4. M
e
n

ingkatnya Kepesertaan PUS yang Menggunakan Kontrasepsi

Indikator Sasaran	Tahun 2017
-------------------	------------

	Target	Realisasi	Capaian (%)
a. Persentase PUS yang Ber- KB	63,10 %	75,90%	120 %

5. M
e
n
i

ngkatnya Pembangunan Keluarga Yang Berkualitas

Indikator Sasaran	Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
a. Cakupan Kelompok Kegiatan yang melakukan Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Kelompok KB	120 lompok	120 Kelompok	100%

B. E
V
A
L
U

ASI KINERJA SASARAN

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja dapat dievaluasi nilai capaian masing-masing kinerja tersebut. Nilai capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir selatan pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat dari Kinerja Capaian Sasaran dan Capaian Kegiatan. Adapun Nilai Capaian Kinerja baik capaian sasaran maupun kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:

Indikator Sasaran	Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Persentase Jumlah Swadaya Masyarakat	4,60%	6,22 %	135

S
wada
ya
murn
i
adala
h
kem

ampuan suatu kelompok masyarakat baik berupa daya maupun dana untuk mewujudkan suatu pembangunan fisik maupun non fisik yang pengadaannya seluruhnya oleh masyarakat itu sendiri, karena didorong kepentingan, dibiayai dengan menggali kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, dimanfaatkan dan dipelihara pula oleh masyarakat. Dengan kata lain, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri tanpa adanya dorongan dari luar..

Sedangkan yang dimaksud dengan Swadaya Penunjang adalah kemampuan suatu kelompok masyarakat yang timbul sebagai akibat adanya bantuan pemerintah berupa dana

untuk mewujudkan suatu bangunan fisik dan atau non fisik yang penggabungannya oleh masyarakat itu sendiri karenan didorong oleh kepentingannya.

Bahwa untuk mengetahui investasi pembangunan yang bersumber dari bantuan pemerintah, dunia usaha dan swadaya masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, maka data tentang swadaya murni masyarakat sangat penting artinya. Karena data swadaya murni masyarakat tersebut sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Secara konseptual, pemberdayaan atau Empowerment memiliki dua makna pokok yakni:

1. Memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat (to give power or authority to) agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungan mandiri.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat (to give ability to or anable) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.

Seluruh peran serta masyarakat dalam keterlibatannya secara langsung dalam pembangunan fisik (prasarana dan sarana) maupun non fisik (peningkatan pengetahuan) keterampilan peningkatan mental spiritual, meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya adalah:

Untuk memonitor dan mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya terhadap keterlibatannya secara langsung dalam pembangunan.

1. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan masyarakat dalam menunjang program – program pemerintah dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan.
2. Untuk memperoleh data tentang pembangunan proyek – proyek swadaya masyarakat maupun investasi yang telah berhasil di himpun oleh masyarakat.
3. Sebagai bahan acuan dorongan semangat kepada masyarakat agar mereka mampu berkompetisi untuk meningkatkan usaha swadaya murni masyarakat

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana perhitungan nilai swadaya masyarakat berdasarkan dana Nagari yang di berikan dan dianggarkan oleh nagari.

Data Jumlah Dana Nagari pembangunan Fisik Perkecamatan dan Jumlah nilai Swadaya.

No	Nama Kecamatan	Rencana		%	Realisasi		%
		Dana Desa Fisik	Swadaya		Dana Desa Fisik	Swadaya	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koto XI Tarusan	14.060.180.243,05	843.607.200,00	6,00	11.408.211.042,00	843.607.200,00	7,39
2	Bayang	10.729.652.952,00	643.777.100,00	6,00	10.575.615.547,00	643.777.100,00	6,09
3	IV Nagari Bayang Utara	4.104.618.300,00	246.275.600,00	6,00	4.104.494.700,00	246.275.600,00	6,00

4	IV Jurai	11.627.911.635,00	697.671.200,00	6,00	11.294.580.768,00	697.671.200,00	6,18
5	Batang Kapas	5.831.491.506,00	349.888.400,00	6,00	5.831.222.606,00	349.888.400,00	6,00
6	Sutera	7.730.801.613,00	463.846.100,00	6,00	6.747.080.651,00	463.846.100,00	6,87
7	Lengayang	5.198.833.512,00	311.927.600,00	6,00	5.128.043.122,00	311.927.600,00	6,08
8	Ranah Pesisir	6.036.589.371,69	376.895.500,00	6,24	5.966.397.000,42	376.895.500,00	6,32
9	Linggo Sari Baganti	19.693.601.757,00	1.181.609.500,00	6,00	17.752.454.989,00	1.181.609.500,00	6,66
10	Air Pura	6.789.975.214,80	348.809.250,00	5,14	6.408.473.833,03	348.809.250,00	5,44
11	Pancung Soal	6.021.008.867,00	325.474.850,00	5,41	6.021.008.700,00	325.474.850,00	5,41
12	Ranah IV Hulu Tapan	6.116.140.949,28	366.967.000,00	6,00	6.114.578.084,00	366.967.000,00	6,00
13	Basa IV Balai Tapan	5.634.237.040,00	338.052.800,00	6,00	5.526.607.956,00	338.052.800,00	6,12
14	Lunang	5.985.142.824,43	358.643.500,00	5,99	5.958.470.272,80	358.643.500,00	6,02
15	Silaut	5.985.142.824,43	358.643.500,00	5,99	5.958.470.272,80	358.643.500,00	6,02
Jumlah		121.545.328.609,68	7.212.089.100,00	5,93	114.795.709.544,05	7.212.089.100,00	6,28

Jumlah Nilai swadaya masyarakat pada Perjanjian Kinerja 4,60% dan realisasi 6,28 %. Peningkatan nilai swadaya masyarakat ini disebabkan tingginya nilai nilai masyarakat dalam pembangunan di tingkat Nagari dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan pembangunan di Nagari.

2. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Nagari

Indikator Sasaran	Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Persentase Produk Unggulan Nagari	25,55 %	28,57 %	112 %
b. Persentase Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat Nagari	50,19 %	67,32%	134%

S

alah
satu
agen
da
oton
omi

daerah adalah untuk lebih mengarahkan daerah untuk memaksimalkan semua potensi yang dimiliki demi lebih mensejahterakan rakyat. Dengan pertimbangan dari berbagai segi kehidupan baik untuk masyarakat, pemerintah, pemerintah pusat serta Negara kesatuan Republik Indonesia..

Bagi pemerintah daerah merupakan suatu kesempatan untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah serta meningkatkan pelayanan umum masyarakat dengan administrasi pemerintahan.

Pemerintah daerah tentunya punya beban moral dalam meningkatkan kualitas daerahnya, baik tingkat kesejahteraan masyarakat maupun pelayanan publik lainnya. Dibutuhkan penataan segala potensi yang ada untuk meningkatkan daya saing daerah, kesejahteraan masyarakatnya, serta mewujudkan ketenteraman dalam hidup bernegara.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan - kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah).

Sedangkan lembaga ekonomi adalah lembaga yang melakukan kegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat. Pengertian lembaga ekonomi yang lain yaitu lembaga yang mengatasi berbagai macam masalah tentang cara produksi , pendistribusian, atau pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Lembaga ekonomi ini lahir sebagai usaha manusia dalam menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berhubungan dengan pengaturan bidang ekonomi guna mencapai kehidupan yang sejahtera.

Manfaat lembaga ekonomi yaitu menjadi lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang ekonomi guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan peran lembaga ekonomi yakni mengatasi berbagai masalah mengenai cara produksi, pendistribusian atau pelayanan suatu jasa yang dibutuhkan masyarakat agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakat di Kabupaten pesisir selatan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana membentuk lembaga lembaga yang di bentuk adalah pokja Nagari, Unit Pengelola Kegiatan SPP Pasca PNPM-MP, Pembentukan Bumag Bersama Nagari, Bumag Nagari dan Pembentukan Kawasan Nagari.

Untuk wilayah kabupaten pesisir selatan UPK berjumlah 15 Kelompok, Pokja Nagari 36 Nagari, Bumag Bersama 5 kelompok, Bumag Nagari 128 dan 3 Kawasan Perdesaan (187 Kelompok). Jumlah Lembaga ekonomi yang di harapkan sampai 2021 adalah UPK 15 Kelompok, Pokja Nagari 37 Kelompok, Bumag Bersama 15 Kelompok, Bumag 182 Kelompok dan Kawasan Perdesaan 5 Kawasan (254 kelompok). Sedangkan pada tahun 2017 pembentukan lembaga ekonomi adalah 3 kawasan, 5 Bumag Bersama dan 128 Bumag Nagari.

Sedangkan untuk produk unggulan pada tahun 2018 terbentuk unggulan di masing masing nagari sebanyak 54 propduk unggulan dari 182 Nagari di wilayah kabupaten Pesisir Selatan.

3. Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Nagari

Indikator Sasaran	Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)

a. Persentase Layanan Pemerintah	70%	=75, 82	108,32
----------------------------------	-----	---------	--------

D

alam penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah, perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah telah mendapat sambutan positif dan penuh harapan bagi seluruh masyarakat di daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat masyarakat dalam berdemokrasi dan melaksanakan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Setelah pemikiran program atau konsep mengenai mekanisme kerja Aparatur pemerintah daerah sampai pada pemerintah Nagari yang terkemas dalam undang-undang pemerintahan daerah disepakati sebagai landasan operasional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Penyelenggara administrasi pemerintah Nagari akan tersusun dan semakin terarah secara lebih baik dan efisien bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat Desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah Desa yang di damping oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN). Pemerintah Nagari dalam menjalankan tugasnya sebagian sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pelayanan masyarakat pemerintah selalu mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Seiring dengan besarnya tuntutan akan penerapan *good governance*, terutama akan pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi semakin besar. Pemerintah merespon tuntutan ini dengan menetapkan tahun 2017 sebagai tahun peningkatan pelayanan publik. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan, seperti misalnya pelayanan prima dan standar pelayanan minimal.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Aparatur pemerintah Nagari di Kabupaten Pesisir selatan dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat dan prasarana kantor wali nagari yang baik. Dengan terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan sehingga Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan meningkatkan saran dan prasana pemerintahan nagari dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tolak ukur pelayanan Pemerintah nagari adalah jumlah nagari yang telah mempunyai sarana dan prasanaran yang lengkap dan jumlah nagari yang telah memiliki kantor dari 182 Nagari yang baru mempunyai sarana kantor walinagari yang lengkap adalah 138 Nagari.

4. Meningkatnya Kepesertaan PUS yang Menggunakan Kontrasepsi

Indikator Sasaran	Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
a. Persentase PUS yang Ber- KB	63,10 %	75,90%	120 %

P

elayan
nan
kelu
arga
bere

ncana juga ditujukan untuk mendukung pencapaian target Millenium Development Goal (MDG's) terutama point 5b mengenai Angka Kematian Ibu (AKI) melalui peningkatan

kualitas dan cakupan sasaran pelayanan keluarga. Program Keluarga Berencana Nasional mempunyai kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk. Salah satu upaya untuk menangani jumlah penduduk adalah melalui kontrol terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi laju utama penduduk. Salah satu cara yang ditempuh untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah dengan melakukan Program Keluarga Berencana untuk mengendalikan fertilitas. Terjadinya kenaikan Total Fertility Rate (TFR) disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masih banyak Pasangan Usia Subur yang tidak ber KB, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tingginya unmet need.

PUS juga memerlukan penyuluhan/promosi kesehatan dalam kehidupannya. Dalam hal ini petugas penyuluh lapangan Keluarga berencana harus mempromosikan KB (Keluarga Berencana) bagi pasangan ini. Tujuannya untuk membatasi kelahiran anak karena mereka subur, tidak memiliki kelainan sehingga mudah memperoleh anak/keturunan. Pasangan usia subur berkisar antara usia 20-45 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Ini dibedakan dengan perempuan usia subur yang berstatus janda atau cerai. Pada masa ini pasangan usia subur harus dapat menjaga dan memanfaatkan reproduksinya yaitu menekan angka kelahiran dengan metode keluarga berencana sehingga jumlah dan interval kehamilan dapat diperhitungkan untuk meningkatkan kualitas reproduksi dan kualitas generasi yang akan datang.

Pelayanan keluarga berencana (KB) diarahkan untuk menunjang tercapainya kesehatan ibu dan bayi. Pelayanan KB bertujuan menunda, menjarangkan, atau membatasi kehamilan bila jumlah anak sudah cukup. Kehamilan yang diinginkan dan berlangsung pada keadaan dan saat yang tepat, akan lebih menjamin keselamatan ibu dan bayi yang dikandungnya. Dengan demikian pelayanan KB sangat berguna dalam pengaturan kehamilan dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak tepat waktu.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebagai berikut;

- Prioritaskan pelayanan KB diberikan terutama kepada pasangan usia subur yang istrinya mempunyai keadaan “4 terlalu” yaitu : terlalu muda(< dari 20 thn), terlalu banyak anak (lebih dari 3 orang), terlalu dekat jarak kehamilan(dari 35 thn).
- Tanggung jawab dalam kesetaraan ber-KB merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Sayangnya pada saat ini hanya 1,1% suami yang beradaptasi aktif dalam ber –KB, padahal tersedia juga alat/metode kontrasepsi untuk pria.
- Setiap Metode kontrasepsi mempunyai keuntungan dan kelemahan masing-masing. setiap klien berhak untuk mendapatkan informasi mengenai hal ini, sehingga dapat mempertimbangkan metode yang paling cocok bagi dirinya.
- Pelaksana pelayanan KB wajib memberikan nasehat tentang metode yang paling cocok sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik sebelum pelayanan KB diberikan kepada klien akan lebih mudah menentukan pilihan.
- Klien juga harus diberi informasi tentang kontraindikasi pemakaian berbagai metode kontrasepsi. Pelaksana pelayanan KB perlu melakukan skrining atau

penyaringan melalui pemeriksaan fisik terhadap klien untuk memastikan bahwa tidak terdapat kontra indikasi dalam pemakaian metode yang akan dipilih.

Dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan menekan angka kelahiran di perlukan peningkatan pelayanan KB terhadap Pasangan Usia Subur, hal ini merupakan salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sehingga penekanan pemasangan kontrasepsi bagi pasangan usia subur sangat di perlukan sekali.

Pada dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase PUS yang ber – KB adalah 75,90 % (Jumlah Pus ber KB = 57.761 orang/76.098 PUS x 100%) hal ini disebabkan karena ada beberapa pasangan subur yang ingin memiliki anak sehingga tidak memakai alat kontrasepsi. Secara keseluruhan keberhasilan Keluarga berencana terhadap pasangan usia subur yang ber-KB sangat baik, berdasarkan persentase capaian kinerja.

5. Meningkatnya Pembangunan Keluarga Yang Berkualitas

Indikator Sasaran	Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
a. Cakupan Kelompok Kegiatan yang melakukan Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Kelompok KB	121 kelompok	120 Kelompok	100%

K

ualit
as
gene
rasi
di

masa datang ditentukan oleh kualitas keluarganya saat ini. Karena itu, upaya mewujudkan keluarga berkualitas harus dimulai sejak perencanaan keluarga. Perjalanan panjang keluarga yang mereka tempuh akan menjadi mata rantai kehidupan dari generasi ke generasi berikutnya

Keluarga merupakan institusi pertama dan utama penentu pembangunan sumber daya manusia. Terdapat dua alasan sederhana terhadap konsep atau kerangka berpikir tersebut. Pertama keluarga adalah tempat seorang individu tumbuh berkembang, dimana tingkat pertumbuhan dan perkembangan tersebut menentukan kualitas individu yang kelak akan menjadi pemimpin masyarakat bahkan pemimpin bangsa dan negara. Kedua, keluarga adalah tempat aktivitas utama seorang individu berlangsung. Membangun keluarga harus dilakukan secara seksama dengan mempertimbangkan dimensi keluarga sebagai sasaran dan pelaku. Hal ini sekaligus mengarah pada peran keluarga sebagai pengembang sumber daya manusia potensial dengan mendaya-gunakan keluarga untuk mempertajam potensi dasar seseorang. Dengan demikian, membangun keluarga adalah rangkaian upaya pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat

untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, yaitu terwujudnya keluarga yang maju, mandiri, sejahtera, hidup selaras, serasi serta seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Upaya membangun keluarga berkualitas dilakukan melalui membangun keluarga sebagai wahana pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan dengan mewujudkan pelembagaan dan pembudayaan visi keluarga berkualitas guna meningkatkan kemampuan keluarga sebagai hal yang berperan dan bertanggung jawab dalam pengembangan anggota keluarga tersebut. Upaya ini perlu memperhatikan sistem nilai yang ada dalam masyarakat, kondisi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta perkembangan globalisasi.

Dalam membangun keluarga berkualitas ini diperlukan pendidikan kepada remaja melalui kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung Program KB seperti Kelompok GenRe, Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Remaja. Dengan kelompok-kelompok kegiatan yang mendukung program keluarga berencana diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan keluarga dalam meningkatkan pembangunan keluarga yang berkualitas.

Pembinaan keluarga berkualitas melalui pembinaan dan penyuluhan penyuluhan kelompok Keluarga Berencana seperti penyuluhan pada kelompok remaja di sekolah-sekolah pada tahun 2017 dilaksanakan di 20 sekolah setingkat SLTP dan SLTA mengenai kesehatan reproduksi remaja dan pembinaan kelompok-kelompok BKL, BKR dan poktan poktan keluarga berencana. Pada tahun 2017 Dinas Pemberdayaan dan Desa, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana pada target Perjanjian kinerja pembinaan kelompok 120 kelompok, dengan capaian diantaranya yaitu: penyuluhan 20 kelompok PIK KRR, 50 Kelompok BKL dan 50 Kelompok BKL, secara kinerja pelaksanaan pembinaan keluarga berkualitas ini terlaksana 100%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN KEUANGAN

Capaian kinerja keuangan dalam rangka realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 yaitu dengan alokasi anggaran Belanja Langsung Rp. 5.811.420.198,- dan terealisasi Rp. 5.524.201.586,- atau tingkat penyerapannya yaitu 95,06 %.

NO	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2			5

		3	4	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	994.219.062	971.881.621	97,75
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.000.000	30.000.000	100,00
3	Program Peningkatan Sumber daya Aparatur	39.145.857	39.145.857	100,00
4	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/Nagari	177.622.460	175.642.499	98,89
5	Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Nagari	271.318.510	259.080.924	95,49
6	Program lembaga sosial dan ekonomi masyarakat Nagari	1.351.079.980	1.291.039.202	95,56
7	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	156.754.226	163.954.226	104,59
8	Program Pengembangan Parawisata	15.736.500	15.736.500	100,00
9	Program Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK KB)	1.968.595.100	1.829.108.078	92,91
10	Program Penguatan kelembagaan	155.877.750	150.483.974	96,54
11	Program Pembinaan Institusi KKBPK	154.809.050	150.932.000	97,50
12	Program Pelayanan Keluarga Berencana	519.963.650	481.611.300	92,62
Jumlah		5.835.122.145	5.558.616.181	95,26

BAB IV

PENUTUP

Dari sasaran yang ditetapkan pada anggaran 2017 secara umum tercapai dengan baik, tetapi perlu dipertahankan untuk masa yang akan datang, kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2017 secara realisasi sasaran tercapai 110 % dan secara realisasi keuangan 95,06 %. Dilihat dari segi realisasi keuangan untuk mencapai kegiatan 95,06% dapat diminimalisasi penggunaan anggaran sebesar 4.93% dalam mencapai kegiatan. Untuk sasaran yang dicapai pada tahun 2017 sudah sesuai dengan perencanaan awal yaitu 100% untuk masing-masing program dan kegiatan.

Painan, 14 Februari 2018
PLT. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan

HAMDI, S.Pt, M.Si

Lampiran 1. PENGUKURAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	Capaian	Satuan
		2017	2017		
1	2	4	5	6	7
Misi : 1 Melaksanakan repormasi birokrasi denbgan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat					
Meningkatnya kesrtaan PUS yang menggunakan Kontrasepsi	Persentase PUS Yang BerKB	70	70	100,00	%
Meningkatnya Pembangunan Keluarga Yang berkualitas	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembangunan keluarga dan pembinaan kelompok KB	120	120	100,0%	kelompok
Misi : 5 Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat obatan terlarang					
Persentase Jumlah Swadaya Masyarakat	Persentase Jumlah Swadaya Masyarakt	4,6	6,22	135,22	%
Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Nagari	Persentase Produk Unggulan Nagari	25,55	28,57	111,82	%
	Persentase Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat Nagari	50,19	67,32	134,13	%
Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Nagari	Persentase Layanan Pemerintah	70	75,82	108,32	%

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama SKPD

Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

NO	Indikator	Satuan	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Pembinaan dan pembentukan Kelembagaan ekonomi perdesan	Kelompok BP SPAM	78	78	78	78	78	78
		Lembaga Ekonomi Masyarakat	51	51	51	51	51	51
		Sosialisasi Pembentukan Bumrag	50	80	100	110	170	182
		Pembentukan Bumrag Bersama	0	2	3	3	3	4
		Pembentukan Kawasan Perdesaan	0	1	1	1	1	1
2.	Pembinaan Lembaga dan Institusi Keluarga Berencana	Kelompok PIK KRR	35	35	35	35	35	35
		Kelompok BKL	5	5	8	5	5	5
		Kelompok BKB	71	78	78	78	78	78
		Kelompok BKR	24	51	51	51	51	51
		Kelompok UPPKS	79	80	100	110	170	182

NO	Indikator	Satuan	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	5	6	7	8	9	10
4.	Peningkatan pelayanan KB	IUD	2.695	2.600	2.713	2.722	2.745	2.765
		MOW	1.532	1.632	1.732	1.732	1.732	1.732
		MOP	514	535	545	560	565	570
		Kondom	303	322	345	367	370	380
		Implant	8.036	8.136	8.236	8.336	8.436	8.536
		Suntik	31.647	31.874	31.912	32.012	32.098	32.187
		Pil	5.070	5.126	5.171	5.270	5.330	5.393

Painan, 14 Februari 2018
 PLT. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Pesisir Selatan

HAMDI, S.Pt, M. Si
 NIP. 19740530 2000003 1 005

Lampiran 3. Prestasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan

Daftar Prestasi

No.	Nama Penghargaan	Tahun
1	UPK Terbaik I Tingkat Propinsi Sumatera Barat	2010
2	Juara Harapan II Kader Posyandu Tingkat Propinsi Sumatera Barat	2011
3	BKAN Terbaik II Tingkat Propinsi Sumatera Barat	2011
4	BKAN Terbaik II Tingkat Propinsi Sumatera Barat	2011
5	Juara II Lomba kb Lestari Teladan 20 Tahun TK. Propinsi Sumbar	2012
8	Juara II Keluarga Harmonis Dalam Rangka Hari Keluarga TK Propinsi	2012
9	Juara II Pelayanan Terbaik Bhakti KB IBI-Kes Tingkat Propinsi	2012
10	Juara III Bulan Bhakti KB-Kes Tingkat Propinsi Sumatera Barat	2012
11	Peringkat II Kompetensi Sekretaris Nagari (Nagari Lakitan)	2012
12	Juara II Jambore PNPM TK. Propinsi Sumbar	2013
13	Juara II TNI KB-Kes Tk. Propinsi Sumbar	2013
14	Enam Besar Tingkat Sumbar Kopetensi Wali Nagari (Nagari Gurun Panjang)	2013
15	Juara II Lomba Pelaksanaan PMT-AS TK. Propinsi Sumatera Barat	2013
16	Terbaik II PPD TK. Propinsi Sumatera Barat	2013
17	Juara I Jambore PNPM TK. Propinsi Sumatera Barat	2014
18	Juara II Pendamping Lokal TK Propinsi Sumatera Barat	2014
19	Juara II PPD Terbaik TK Propinsi Sumatera Barat	2014
20	Juara II Lomba Keluarga Harmonis Sejahtera TK. Propinsi Sumbar	2014
21	Juara III Kb Lestari Teladan 15Tahun TK. Propinsi Sumatera Barat	2014
22	Juara I Regional V Kelompok KB Pria.	2015
23	Juara Harapan II Kader Posyandu Tingkat Propinsi Sumatera Barat	2015
24	Juara III UPK Tingkat Propinsi Sumatera Barat.	2015
25	Juara I Puskesmas dengan pelayanan MKJP 5-10.000 Aseptor Tingkat Propinsi Sumatera Barat	2016
26	Juara I Regional II dengan Pelayanan MKJP 5-10.000 Aseptor Tingkat Nasional	2016
27	Juara I Lomba Menu Basa Tingkat Propinsi	2016
28	Juara II Motivator KB Pria Propinsi Sumatera Barat	2016
29	Juara III Pelaksanaan Bulan Bhakti TNI KB Kes Tingkat Propinsi	2016
30	Juara III Kesenian Daerah pada Jambore Kader PKK Tingkat Propinsi	2016
31	Juara III Lomba PHBS Tingkat Propinsi	2016
32	Juara Harapan 1 Penampilan senam ria pada jambore kader PKK Tingkat Propinsi	2016
33	Faporit Penampilan Kontingen yel yel Daerah pada Jambore PKK Tingkat Propinsi	2016

No.	Nama Penghargaan	Tahun
34	Juara II Menu PMT-AS tingkat Propinsi Sumatera Barat	2017
35	Juara Harapan I Lomba Posyandu terintegrasi TK. Propinsi Sumatera Barat	2017
36	Juara I Lomba B2SA Tingkat Propinsi Sumatera Barat	2017
37	Juara Faporit Lomba B2SA Tingkat Nasional	2017
38	Juara 1 Lomba Nagari Tingkat Propinmsi	2017
39	Lima besar Lomba Nagari Tingkat Regional Sumatera	2017

Painan, 14 Februari 2018
 PLT. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Pesisir Selatan

HAMDI, S.Pt, M. Si
 NIP. 19740530 2000003 1 005

Lampiran: 5 Realisasi Anggaran

NO	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	994.219.062	971.881.621	97,75
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.000.000	30.000.000	100,00
3	Program Peningkatan Sumber daya Aparatur	39.145.857	39.145.857	100,00
4	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/Nagari	177.622.460	175.642.499	98,89
5	Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Nagari	271.318.510	259.080.924	95,49
6	Program lembaga sosial dan ekonomi masyarakat Nagari	1.351.079.980	1.291.039.202	95,56
7	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	156.754.226	163.954.226	104,59
8	Program Pengembangan Parawisata	15.736.500	15.736.500	100,00
9	Program Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK KB)	1.968.595.100	1.829.108.078	92,91
10	Program Penguatan kelembagaan	155.877.750	150.483.974	96,54
11	Program Pembinaan Institusi KKBPK	154.809.050	150.932.000	97,50
12	Program Pelayanan Keluarga Berencana	519.963.650	481.611.300	92,62
Jumlah		5.835.122.145	5.558.616.181	95,26

Painan, Februari 2018
PLT. Kepala Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir
Selatan

HAMDI, S.Pt, M. Si
NIP. 19740530
2000003 1 005